

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KOLABORATIF TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Frida Purwanti
Universitas Diponegoro

Permasalahan TNKJ

- Tekanan terhadap kawasan makin meningkat karena pola pemanfaatan SDA kurang baik
- Dukungan dan keterlibatan para pihak masih minim karena kurang sosialisasi dan informasi
- Pengawasan lemah karena kapasitas pengelolaan terbatas
- Sistem koordinasi dan kelembagaan pengelolaan belum berjalan efektif

PENGELOLAAN TNKJ

Prinsip *Co-management* :

1. Partisipasi
2. Komitmen
3. Koordinasi
4. Transparan

Tujuan Konservasi:

1. Perlindungan
2. Pengawetan
3. Pemanfaatan

CO-MANAGEMENT

Tujuan Pengembangan :

1. Peningkatan kapasitas
2. Peningkatan peran serta
3. Penegakan hukum
4. Perbaikan sistem pengelolaan

Arah Pembangunan Jangka Panjang

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas akses pada modal usaha dan sumberdaya alam, memberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan yang berkelanjutan

Beberapa pengertian

- Kemitraan, kolaborasi, atau koalisi merupakan konsep yang saling terkait, namun masing-masing digunakan untuk menggambarkan salah satu tingkat tertentu dalam konsep partisipasi
- Partisipasi adalah proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, secara individu atau kelompok, untuk mempengaruhi keputusan publik
- Tingkat partisipasi sangat bervariasi mulai tahap manipulasi, terapi, menginformasikan, konsultasi, menentramkan (placation), kemitraan (partnership), delegasi kekuasaan, hingga kontrol masyarakat

Pengertian Partisipasi

- pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka, menjadi actor sosial daripada subyek pasif, mengelola sumberdaya, membuat keputusan dan mengontrol kegiatan yang berdampak terhadap kehidupan mereka (Cernea, 1991)
- keterlibatan spontan terhadap suatu kegiatan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama
- proses dimana stakeholder mempengaruhi dan berbagi kendali terhadap inisiatif-inisiatif pengembangan dan keputusan-keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhinya

Hak Dasar Masyarakat

- akses informasi
- akses partisipasi
- akses masyarakat terhadap keadilan



Prinsip yang dianut dalam Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas

- a) Bersifat multi-dimensi dan berorientasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b) Mencakup multi-stakeholder : Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat, swasta dan penyedia layanan (*service provider*) pengembangan dan peningkatan kapasitas
- c) Bersifat "*demand driven*" yaitu kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas berasal dari stakeholder yang membutuhkan.

Pada dasarnya setiap individu dalam masyarakat akan dengan sendirinya berpartisipasi untuk menegakkan aturan main yang diciptakan/dibuat, bila :

- mereka merasa terlibat dalam membuat aturan main itu,
- aturan dirasakan cukup adil, jelas apa manfaatnya untuk mereka (tidak selalu dalam bentuk ekonomi),
- keuntungan terdistribusi cukup merata diantara mereka

Peran serta rakyat dalam konservasi
sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya diarahkan dan digerakkan
oleh pemerintah melalui berbagai
kegiatan yang berdaya guna dan berhasil
guna

(Pasal 37 (1) UU No.5 /1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya)

Elemen kunci dari kesuksesan partisipasi dan kemitraan

- Kecocokan antar peserta terkait
- Keuntungan untuk semua peserta
- Keseimbangan perwalian dan kekuasaan untuk seluruh peserta perlu disepakati dan dikembangkan
- Mekanisme komunikasi
- Penyesuaian, karena ketidakpastian dan perubahan keadaan yang selalu dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya
- Integritas, kesabaran dan keajegan semua peserta

4 jenis hak dan kepemilikan SDA

- ❑ **Milik negara (*state property*)** : Pemerintah memiliki dan bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan sumberdaya. Para individu wajib mematuhi aturan, departemen yang bersangkutan berhak untuk memutuskan aturan main penggunaannya.
- ❑ **Milik pribadi (*private property*)** : sumberdaya dimiliki perorangan atau sekelompok orang dengan bukti kepemilikan yang jelas. Pemilik berhak memanfaatkan SDA dan berkewajiban menghindari pemanfaatan SDA yang eksekif sesuai aturan dan norma yang berlaku.
- ❑ **Milik umum atau milik bersama (*common property*)** : milik sekelompok masyarakat tertentu yang telah melembaga, dengan ikatan norma atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya. Pemilik berhak untuk tidak mengikutsertakan individu lain diluar kelompoknya, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama.
- ❑ **Tak bertuan (*open access*)** : sumberdaya milik semua orang. Dalam hal ini tidak ada unsur kepemilikan SDA, sehingga setiap orang dari manapun bisa memanfaatkannya. Artinya, masing-masing individu hanya memiliki *privilege*, siapa cepat dia dapat, tapi bukan hak.

HUBUNGAN HAK MILIK DAN FUNGSI SDA

| HAK (<i>bundle of rights</i>) | STATUS PEMEGANG HAK | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | DI DALAM KAWASAN BUDI DAYA | | DI DALAM KAWASAN LINDUNG (ada fungsi publik) | |
| | PEMILIK | PENGGUNA | PEMILIK | PENGGUNA |
| Memasuki dan memanfaatkan SDA | √ | √ | √ | √ |
| Menentukan bentuk manajemen pengelolaan SDA | √ | √ | Diatur oleh lembaga publik | Diatur oleh lembaga publik |
| Menetapkan siapa yang dapat ikut serta memanfaatkan SDA | √ | Diatur oleh lembaga publik | √ | Diatur oleh lembaga publik |
| Memperjual belikan atau mengubah fungsi peruntukan SDA | √ | Diatur oleh lembaga publik | Diatur oleh lembaga publik | Diatur oleh lembaga publik |

Keterangan : √ = diatur sepenuhnya oleh pemegang hak

Co-management (Pengelolaan Kolaboratif)



Pentingnya Kolaborasi di TNKJ

- Perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi
- Sifat sumberdaya pesisir dan laut yang *open access*
- Perbedaan kepentingan stakeholder
- Keseimbangan upaya pelestarian dan peningkatan ekonomi

Pengertian *Co-management*

1. Proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip **saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan keuntungan** (Permenhut No : P.19/2004 ttg Kolaborasi Pengelolaan KSA & KPA)
2. Pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam, sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang dilakukan pihak lain (Pomeroy and Berkes (1997))
3. Suatu bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan seluruh stakeholder secara adil dan memandang harkat setiap stake sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, dalam rangka pencapaian tujuan bersama (Tadjudin, 2000)

Lanjutan

- salah satu tingkat partisipasi dimana para pihak memiliki posisi tawar untuk berbagi kekuasaan dan kesetaraan peran.
- partisipasi aktif dalam manajemen SDA oleh masyarakat ataupun individu yang mempunyai keterkaitan/hubungan, ataupun kepentingan terhadap SDA

Elemen penting *Co-management*

- ❖ Dukungan institusi yang kuat
- ❖ Keterlibatan efektif stakeholder
- ❖ Mekanisme capacity building

Pemahaman Kolaborasi Pengelolaan

- Disusun dengan memperhatikan aspirasi para pihak yang terkait
- Dilaksanakan dalam rangka pembagian wewenang/hak dan kewajiban masing-masing institusi dalam pengelolaan kawasan
- Disusun melalui tahapan penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama

Kegiatan pengelolaan kawasan yang dapat dikolaborasikan

1. Penataan kawasan
2. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan
3. Pembinaan daya dukung kawasan
4. Pemanfaatan kawasan
5. Penelitian dan pengembangan
6. Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan
7. Pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan
8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi
9. Pembinaan partisipasi masyarakat

PARTISIPASI DAN KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN AKAN EFEKTIF JIKA :

1. Ada kesetaraan antar para pihak sehingga tumbuh penghargaan dan kepercayaan
2. Ada mekanisme komunikasi dan koordinasi yang baik
3. Selalu ada penyesuaian selama proses pengelolaan berlangsung
4. Integritas dan kesabaran pada kemitraan

Pelaksanaan Kolaborasi

1. Persiapan Pelaksanaan

- ✓ Inventarisasi dan identifikasi jenis kegiatan pengelolaan yang akan dikolaborasikan
- ✓ Koordinasi dan konsultasi antara para pihak
- ✓ Penandatanganan kesepakatan antara para pihak

2. Pelaksanaan Kolaborasi :

- ✓ Dapat membentuk lembaga
- ✓ Menyusun rencana kegiatan

3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

merupakan proses pembelajaran bersama sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya

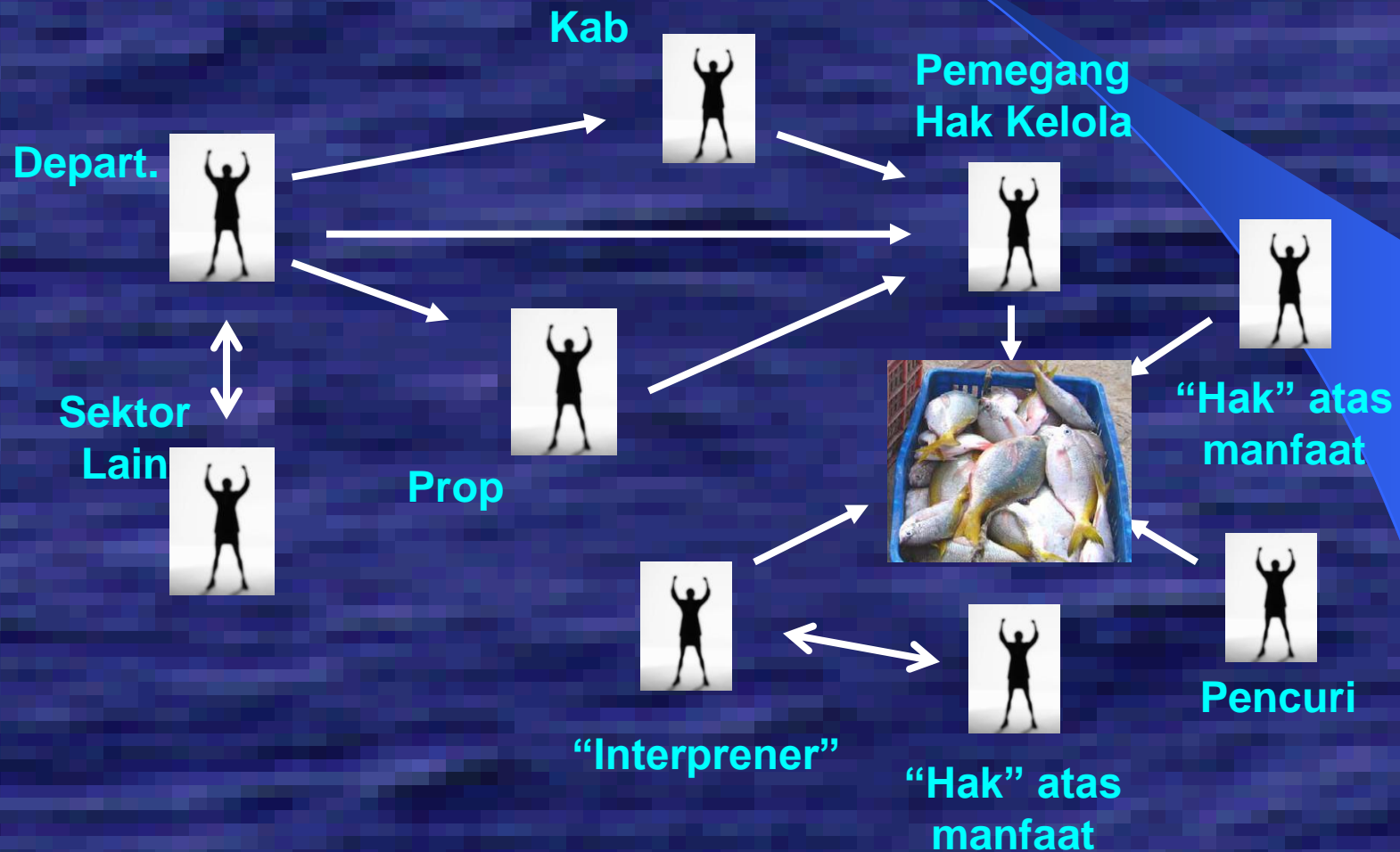
Peran Kelembagaan



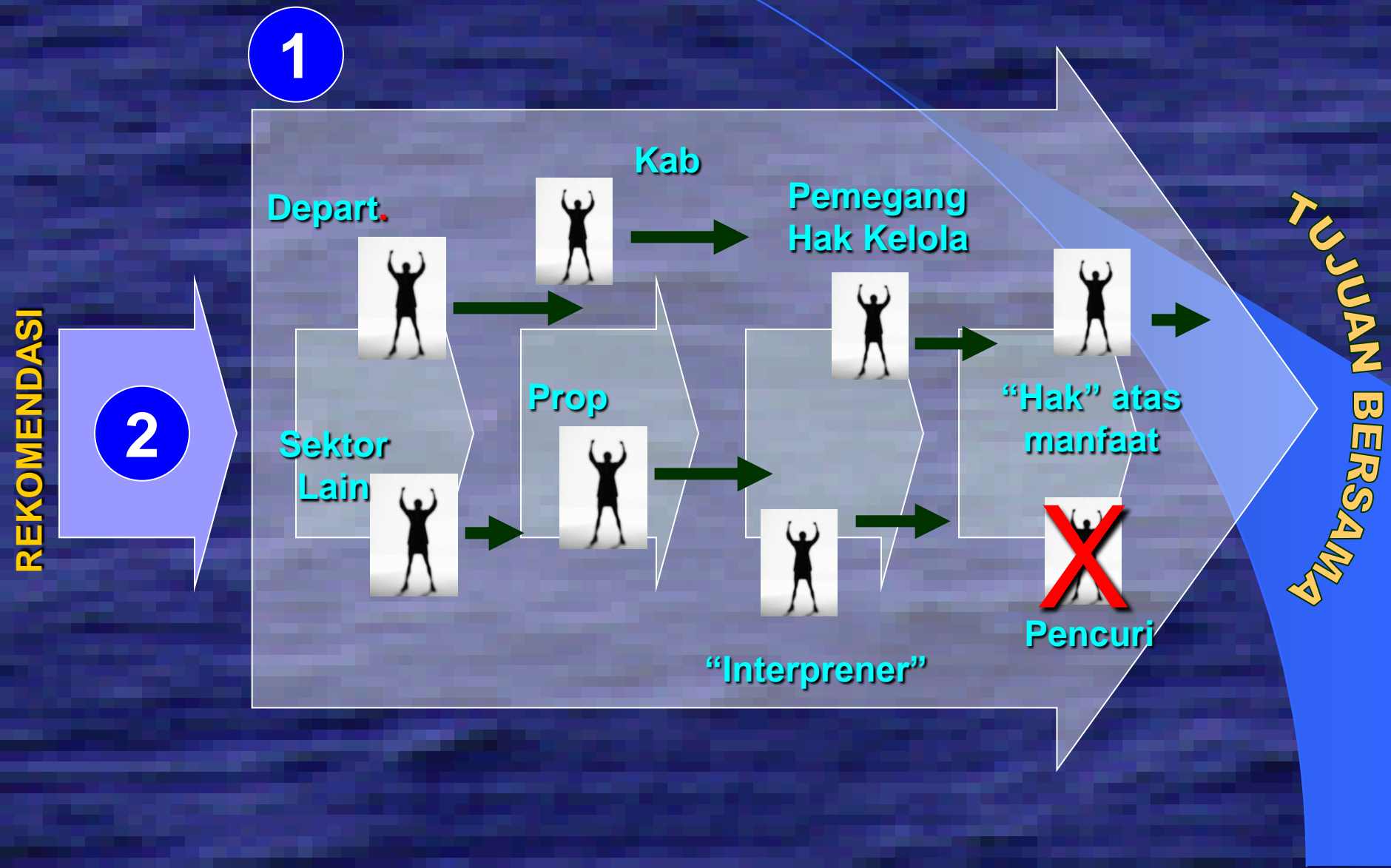
Tujuan menciptakan institusi yang terkait dengan pengelolaan SDA

- mengatur keadilan dan pemerataan distribusi manfaat
- mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar lestari

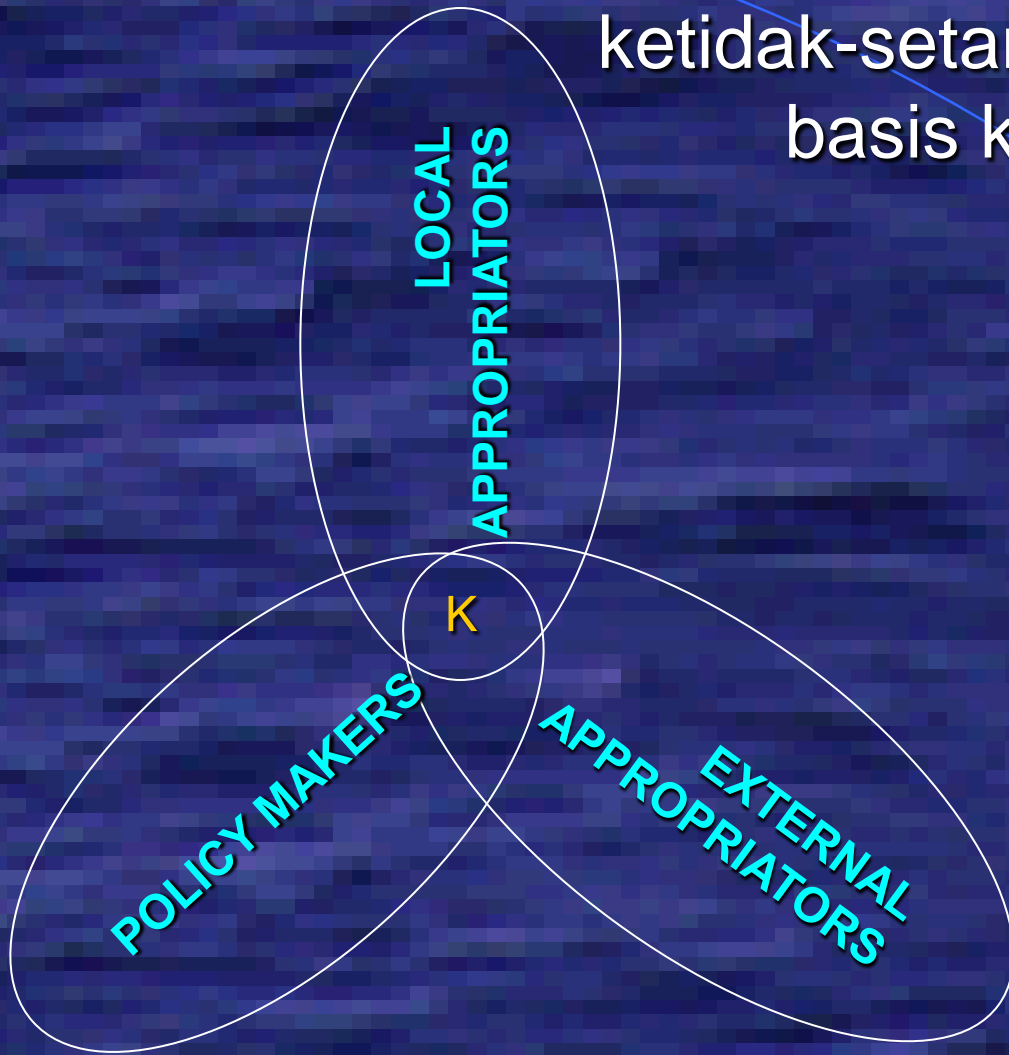
SITUASI PENGELOLAAN SDA



SASARAN PENATAAN KELEMBAGAAN



ARENA KOORDINASI : ketidak-setaraan dlm menggunakan basis klaim pemanfaatan SDA



- **LA** perlu diketahui lebih dahulu keinginan dan masalah yang dihadapinya; LA tidak homogen
- **EA** yang memanfaatkan resource yg sama dng LA – tidak homogen
- **PM** seperti Pemda, Departemen/sektors; PM tidak homogen

KOORDINASI YANG BAIK

MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK STAKEHOLDERS,
SEPERTI :

- Antar tatanan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
- Antar sektor/departemen
- Antar disiplin ilmu
- Antar stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat)
- Antar hulu dan hilir

Mungkinkah kapasitas yang kita miliki dapat dipersatukan ???



Terima kasih